**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
ATAU PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGGUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam memilih Kepala Desa;

b. Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bogor dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian, Kepala Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KEENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

4. Camat adalah Camat Nanggung.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. BPD adalah **BPD Nanggung**.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
13. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjangkaran.
14. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat Desa atau Warga Desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Hasil pemilihan.
17. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
18. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.

19. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
21. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II
PERSYARATAN DIPILIH DAN MEMILIH
Pasal 2

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun, setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak tercabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal desanya dan dikenal warga desa;
- l. Terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desanya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

- m. Bagi pegawai/anggota TNI/POLRI, mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat atau atasannya yang berwenang.

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran pemilihan;
- b. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saat pendaftaran pemilih;
- e. Tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh BPD.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BPD, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan diselenggarakannya tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Pemilihan terdiri-dari :

- a. Unsur BPD;
- b. Unsur Perangkat Desa.

Pasal 6

Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota-anggota.

Pasal 7

Bakal Calon Kepala Desa tidak boleh ditunjuk menjadi panitia pemilihan.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan administrasi bakal calon;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan serta disahkan oleh BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk disahkan oleh BPD;
- e. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- f. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara;
- g. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;
- h. Mengumumkan nama-nama bakal calon, dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh penduduk;
- i. Melaksanakan undian tanda gambar calon;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Melaksanakan penghitungan suara;
- l. Membuat berita acara dan melaporkannya kepada BPD;
- m. Melaporkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada BPD;
- n. Menjaga ketertiban dan keamanan pada pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Penjaringan bakal Calon

Pasal 9

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
- b. Persyaratan administrasi bakal calon;
- c. Rencana waktu tahapan pemilihan pemungutan suara.

Pasal 11

Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon yang mendaftarkan diri secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (sembilan), maka penjaringan diperpanjang 14 (empat belas) hari.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah pepanjangan waktu penjaringan yang ke dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka penjaringan dinyatakan ditutup.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

Persyaratan administrasi bakal calon diserahkan oleh bakal calon kepada panitia pemilihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya waktu penjarangan.

Pasal 16

Jumlah calon ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 17

Penyaringan calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar :

- a. Kelengkapan proses administratif;
- b. Kebenaran formulir persyaratan administratif;
- c. Seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal bakal calon melebihi 6 (enam) orang.

Pasal 18

Hasil penyaringan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditanda tangani oleh ketua, sekretaris dan anggota-anggota panitia pemilihan serta dilaporkan kepada BPD.

Pasal 19

Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia penyaringan.

Pasal 20

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat menetapkan tentang dilangsungkannya atau tidak dilangsungkannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

Dalam hal BPD menetapkan pemilihan Kepala Desa tidak dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pemilihan Kepala Desa ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

Kampanye dilaksanakan 8 (delapan) hari menjelang hari pemungutan suara dengan ketentuan selama-lamanya 6 (enam) hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari.

Pasal 23

Undian tanda gambar dilaksanakan oleh panitia dihadapkan para calon dengan disaksikan para pejabat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 24

Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Penyampaian pendapat di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
- b. Pemasangan tanda gambar, bendera atau atribut ditempat umum.

Pasal 25

Pengecualian dari tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam huruf b adalah :

- a. Rumah sakit;
- b. Sekolah;
- c. Kantor-kantor pemerintah;
- d. Tempat-tempat peribadatan seperti masjid, musholla, dan tempat-tempat lain yang sejenis.

Pasal 26

Kampanye tidak diperkenankan dilakukan secara berlebih-lebihan dengan membagikan barang, uang atau fasilitas lainnya, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai atau konvoi.

Pasal 27

Selama masa kampanye, tidak dibenarkan melakukan intimidasi dan saling menghujat antara sesama calon.

Bagian Kelima

Sanksi Kampanye

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, berupa peringatan.
- (2) Dalam hal peringatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran, maka BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

Bagian Keenam

Pemungutan Suara

Pasal 29

Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat.

Pasal 30

- (1) Pemberian suara dilakukan yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar yang bentuk, model, ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan atau simbol organisasi/lembaga pemerintah/agama.

- (3) Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 31

- (1) Jumlah quorum untuk sahnya pemungutan suara adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daftar pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pemungutan suara diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama (2) jam.
- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah perpanjangan waktu yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, setelah diundur 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dengan quorum setelah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih.
- (6) Dalam hal quorum setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon atau wakilnya diawasi oleh pejabat.
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara dan menghitung surat suara di hadapan para saksi.

Pasal 33

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
 - c. Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. Memuat tanda-tanda lain yang memuat identitas pemilih;
 - e. Memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. Mencoblos di luar kotak dan lingkaran atau tanda gambar.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi, maka keputusan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 34

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.

Pasal 35

Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 36

Pengangkatan calon terpilih sebagai Kepala Desa dilakukan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 37

Keputusan BPD tentang pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 38

Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD.

Bagian Kesembilan

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 39

Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan keputusan BPD.

Pasal 40

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kesepuluh
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (3) Pembatasan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) berlaku pula bagi seseorang yang telah menduduki jabatan Kepala Desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan Desa ini.

Bagian Kesebelas
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setempat, yang didapat dari gotong royong berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan.

BAB IV
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala BPD.

- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.
- (4) Kepala Desa mempertanggungjawabkan akhir masa jabatannya ditolak oleh BPD, tidak dapat dicalonkan kembali menjadi Kepala Desa.

BAB V

LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 44

Kepala Desa dilarang :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan kewenangan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;
- b. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang berhubungan dengan kepentingan Desa;
- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan selain mewakili Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 45

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati atas usul BPD dalam hal yang bersangkutan ditunda atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan.
- (2) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Kepala Desa tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas usul BPD.
- (4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Kepala Desa dijatuhi pidana, sedang yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud, BPD mengusulkan pada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa, tanpa menunggu selesainya upaya banding atau kasasi tersebut.
- (5) Kepala Desa yang setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, direhabilitasi namanya oleh Bupati, dan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa sampai saat berakhirnya masa jabatan, atas usul BPD.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 46

Kepala Desa berhenti atau dapat diberhentikan atas usul BPD, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma hidup yang berkembang dalam masyarakat Desa;

- f. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung-jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh BPD;
- f. Ditolak pertanggungjawabannya oleh BPD sebanyak dua kali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

Pemberhentian Kepala Desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, b dan c, ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 48

Pemberhentian Kepala Desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, f dan g, berdasarkan keputusan BPD yang diambil dalam rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa karena sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka sekretaris desa atau yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas selaku Kepala Desa atas usul BPD.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat menjalankan tugasnya maka Bupati memberhentikan Kepala Desa dari jabatannya dan menetapkan pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa atas usul BPD.

BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Pejabat Kepala Desa diangkat dengan keputusan Bupati dari Perangkat Desa, warga Desa atau pejabat lainnya atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Pejabat Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (4) Hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sama dengan hak dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 51

BPD dapat membatalkan hasil pemilihan jika terdapat :

- a. Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan bahwa seandainya tidak terdapat kecurangan-kecurangan tersebut, calon terpilih tidak akan mendapat dukungan suara terbanyak;
- b. Pemalsuan ijazah dan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dengan pemanasan.

Pasal 52

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa.

Pasal 53

Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah dan umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, belum dapat dibuktikan, maka pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Pasal 54

Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah dan umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diketahui atau dapat dibuktikan setelah pelantikan maka Bupati atas usul BPD membrhentikan dan mengangkat Pejabat Kepala Desa.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENCALONAN

PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 55

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka Bupati atas usul BPD memperpanjang masa jabatan Kepala Desa untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Jika penghitungan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), setengah ditambah satu atau seperenam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 48 menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2001**